

## ABSTRAK

Pesimisme bahwa korupsi bisa diberantas tampak saat melihat fenomena merebaknya korupsi di lembaga legislatif yang ada di berbagai daerah. Situasi saat partai politik ramai-ramai membela kadernya di daerah memang kemudian menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Sampai saat ini, menjadi cukup sulit membedakan antara yang benar-benar koruptor dan yang bukan, karena keduanya menjadi rancu.

Pun demikian, situasi yang lain muncul di Sidoarjo. Utsman Ikhsan, mantan Ketua DPRD Sidoarjo dari PKB malah terkesan tidak mendapat bantuan dan dukungan dari partainya saat ia juga terjerat tuduhan tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dewan 2003 senilai Rp 21,9 miliar. Ia seperti dikorbankan begitu saja, baik oleh rekan sejawatnya di DPRD (dari PKB atau dari partai lain) maupun partainya sendiri.

Berangkat dari situasi tersebut dan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut; *pertama*, bagaimana pandangan 'politisi sarungan' (politisi dari PKB) di Sidoarjo terhadap tuduhan korupsi yang ditimpakan. Dan *kedua*, bagaimana politisi sarungan melakukan *self protection* (perlindungan diri) atas dugaan korupsi setelah penahanan Utsman Ikhsan dalam kasus korupsi dana APBD 21 miliar.

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Sedangkan teori strukturasi Giddens juga dianggap relevan untuk banyak dilibatkan dalam penelitian ini, seperti halnya beberapa teori menyangkut korupsi seperti yang disampaikan SH Alatas, George Junus Aditjandra, dan beberapa yang lain. Penentuan lokasi penelitian sendiri dilakukan di Sidoarjo sesuai dengan latar belakang masalah di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi dan *depth interview* dengan menggunakan pedoman wawancara. Selanjutnya informan atau sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang bisa diketahui sebelumnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu pula. Kemudian, hasil temuan data akan diseleksi dan dianalisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan muncul beberapa kesimpulan, antara lain menyebut bahwa pada tataran kesadaran diskursif dan praktis, 'politisi sarungan' di DPRD Sidoarjo secara praktis menyadari jika korupsi tak seharusnya dilakukan, namun ternyata mereka lebih berani, paling tidak lebih siap, melakukan korupsi dibandingkan politisi di luar 'politisi sarungan'. Hal itu ditunjukkan dengan mereka yang secara aktif memperjuangkan pembenaran atas penyelewengan sistem pertanggungjawaban (birokrasi). Mereka sangat mahir dalam memberikan dasar-dasar yang dijadikan dalih saat melakukan sistem penyelewengan administrasi dan titik-titik paling lemah yang dimiliki. Mereka memiliki sistem 'keamanan ontologis' yang unik, membawa konsekuensi yang mampu memberikan pembenaran yang unik pula dalam rangka meminimalisasi kecemasan yang muncul. Pembenaran-pembenaran itu diungkapkan dengan cara bersikap kompromistis pada ketidakjelasan aliran dana di dewan.